

## **BAB II**

### **PEREKONOMIAN NEGARA JEPANG**

Saat ini Jepang merupakan negara yang dikenal dengan perekonomian yang maju walaupun dengan keterbatasan sumber daya alam. Meski dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang, namun dapat membuktikan keberhasilannya dalam hal perekonomian. Negara Jepang mampu bersaing dengan negara lain di dunia Internasional dalam sektor perekonomian. Perekonomian di Negara Jepang tentunya tidak lepas dari bidang perindustrian, yang mana industri sangat mendominasi dan mempengaruhi sektor perekonomian di negara tersebut.

Industri di Jepang mengalami peningkatan kinerja secara perlahan. Walau industri pernah mengalami penurunan yang membuat pasang surut tetapi berkat bantuan dari Amerika Serikat masih membuat Jepang bisa melaksanakan berbagai kebijakan yang dibuat. Pemerintah Jepang selalu berhasil membuat terobosan untuk menyelamatkan keadaan negara agar tidak semakin kacau. Banyak cara yang dilakukan oleh Jepang untuk menjadi negara yang lebih mandiri dan maju tanpa bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Untuk mendapatkan hasil tersebut, banyak sekali hal yang harus Jepang hadapi sebelum mencapai ekonomi yang lebih mandiri seperti sekarang ini.

#### **2.1 Keruntuhan Ekonomi Jepang Pasca Perang Dunia II**

Perang Dunia II berlangsung sejak September tahun 1939 hingga September tahun 1945 yang melibatkan dua kubu besar yaitu kelompok sekutu yang di antaranya ada Negara Amerika, Inggris, Perancis dan negara lainnya, kelompok sentral yaitu Negara Jepang, Jerman, dan Italia. Perang Dunia II merupakan peristiwa perang terbesar sepanjang sejarah. Dianggap sebagai peristiwa bersejarah terbesar karena banyaknya pihak yang ikut terlibat serta dalam perang tersebut. Penyebab umum terjadi perang dunia kedua di antaranya kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dalam menciptakan perdamaian dunia, selain itu adanya persaingan antar negara maju dalam hal militer dan persenjataan, dan adanya aliansi politik yang memecahkan negara di Eropa. (Chickering Roger, 2006: 64) Sedangkan

penyebab khusus dalam perang dunia kedua yaitu di Kawasan Eropa, berupa serangan kilat (blitzkrieg) yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Alasan atas penyerangan tersebut adalah untuk merebut kembali kota Danzig (penduduknya Bangsa Jerman) di mana dalam waktu singkat sebagian besar Polandia dikuasai Jerman dan juga di Kawasan Asia Pasifik, ditandai dengan adanya penyerbuan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut di Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 1941. (Kennedy, David M, 2001: 749–750) Dari beberapa penjelasan dari penyebab di atas tidak lepas dari latar belakang rasa balas dendam antar negara yang kalah dalam Perang Dunia I. Negara-negara yang kalah dalam perang dunia pertama menganggap belum tuntas dan ingin membalas serta menunjukkan kekuatan negaranya dalam Perang Dunia II.

Pada Perang Dunia II, Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Negara Amerika yaitu Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember tahun 1941 yang akhirnya membawa Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Pearl Harbour sendiri merupakan pangkalan Angkatan Laut di Amerika Serikat yang berada di Pulau Oahu, Hawaii, Barat Honolulu. Penyerangan Jepang dilakukan pada pagi hari saat pasukan Amerika Serikat sedang tidak siaga untuk berperang. Saat penyerangan tersebut membuat Amerika Serikat ingin melakukan penyerangan balasan karena mengalami kerugian ekonomi dan kehilangan banyak korban jiwa. (Prange et al. Desember 7, 1941: 174)

Oleh karena itu, Amerika membalas kejadian tersebut dengan menjatuhkan bom atom ke dua kota besar di Jepang yaitu Kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang di mana kehancuran kedua kota tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia II. Kaisar Hirohito langsung menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Kaisar Hirohito menjadi tanda berakhirnya Perang Pasifik dan runtuhnya sistem monarki di Jepang. Jepang mengalami kekalahan yang sangat besar akibat dijatuhkannya bom atom tersebut. (McNelly, 2000: 138)

Kekalahan dalam Perang Dunia II membuat masyarakat Jepang mengalami perubahan sikap yang drastis. Masyarakat Jepang yang terkenal dengan masyarakat yang selalu optimis dan memiliki kepercayaan yang tinggi dalam kondisi apa pun.

Banyaknya korban yang terlibat dalam perang dunia kedua tersebut baik yang terlibat maupun tidak. Hal tersebut lantas membuat masyarakat di Negara Jepang merasa dikorbankan oleh pemerintahannya sendiri. (Lifton, 1991: 17)

Berakhirnya Perang Dunia II membuat banyak negara mengalami krisis akibat adanya perang skala besar itu, terutama dalam hal perekonomian. Sebelum terjadinya perang dunia kedua, Negara Jepang memiliki nilai Gross Domestic Product (GDP) yang relatif stabil, namun ketika perang dunia dua terjadi dan Negara Jepang menjadi salah satu yang kalah, tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi negaranya. Negara Jepang merupakan salah satu dari negara yang ikut mengalami kekalahan dalam perang dunia kedua. Setelah mengalami kekalahan dalam perang dunia kedua, keadaan internal Negara Jepang juga mengalami masalah. Salah satu masalah internal yang dialami oleh Negara Jepang di antaranya adalah masalah perekonomian Negara Jepang yang semakin memburuk setiap harinya dikarenakan banyaknya perusahaan atau pun industri yang berada di Negara Jepang mengalami kebangkrutan karena banyaknya para investor yang menarik investasinya. (JPO Japan, 2017)

Para investor menarik investasinya karena melihat keadaan ekonomi atau pun politik di Negara Jepang yang semakin memburuk dan tidak terkendali. Keadaan infrastruktur di Negara Jepang juga sangat buruk dan tidak beraturan, adanya bencana kemanusiaan yang menimpa masyarakat di Negara Jepang yang diakibatkan rendahnya angka kelahiran dan tingginya angka kematian dalam negaranya. Selain itu bencana yang disebabkan dari polusi kimia nuklir hingga saat ini masih dirasakan oleh masyarakat di Negara Jepang. Beberapa hal tersebut membuat Negara Jepang mengalami keterpurukan dalam beberapa tahun setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. (Sekiguchi, Sueko. 1979: 7-9)

Negara Jepang mencoba bangkit dengan sedikit demi sedikit memperbaiki keadaan negaranya, salah satunya adalah dengan memperbaiki perekonomiannya dengan orientasi kebijakan ekonomi yang baru. Kebangkitan Negara Jepang tentunya tidak begitu saja terjadi, melainkan ada faktor-faktor yang mendorong negara tersebut bangkit dari keterpurukan. Faktor internal yang mendorong Negara Jepang untuk bangkit dari keterpurukan adalah adanya karakter dan nilai- nilai

ludur bangsa Jepang, yang mana Negara Jepang merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional negaranya. Sedangkan faktor eksternal yang mendorong Negara Jepang untuk bangkit dari keterpurukan adalah adanya pendudukan Negara Amerika Serikat di Negara Jepang dan munculnya perang Korea yang menguntungkan bagi Negara Jepang. (Suryohadiprojo, 1987: hlm. 49) Dari kutipan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bangsa Jepang memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan bangsa-bangsa lain dalam menghadapi keterpurukan ekonomi. Selain faktor kebijakan ekonomi, Negara Jepang mulai bangkit dari keterpurukan dikarenakan masyarakat Jepang pantang menyerah dalam menghadapi keterpurukan ekonomi dengan selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional negaranya.

Negara Amerika Serikat menduduki Negara Jepang pada tahun 1945 hingga 1952. Banyak kebijakan yang diterapkan oleh Negara Amerika Serikat pada Negara Jepang di mana Negara Amerika Serikat memanfaatkan kesempatan peluang untuk memperluas hegemoni negaranya. Kebijakan yang diterapkan Amerika Serikat pada saat pendudukannya di Negara Jepang antara lain adalah menghancurkan militer yang menjadi penyebab perang, mengadili penjahat-penjahat perang, membersihkan para pemimpin yang terbukti bertanggung jawab atas politik agresi, pembayaran ganti rugi perang, penghancuran industri perang dan perampasan alat-alat perang, pendemokrasian politik, ekonomi, dan pendidikan. Terdapat kebijakan tersebut tentunya lebih menguntungkan Amerika Serikat dan malah memperburuk keadaan Negara Jepang dan membuat keadaan Negara Jepang semakin chaos. Namun kebijakan yang diterapkan Negara Amerika Serikat tidak berlangsung lama, karena adanya Perang Korea yang membuat Negara Jepang mampu merebut kekuasaan dari Negara Amerika Serikat. (Tjeng, 1983: 363) Dengan adanya Negara Amerika Serikat yang memanfaatkan kesempatan dari hancurnya Negara Jepang, membuat keuntungan memperluas wilayah kekuasaan namun tidak berlangsung lama akibat pecahnya Perang Korea yang dimanfaatkan Jepang untuk merebut kekuasaan negaranya sendiri.

## 2.1 Tiga Aspek yang Mempengaruhi Ekonomi Jepang

Perang Korea membuat proses pengembalian kedaulatan Negara Jepang dari Negara Amerika Serikat menjadi cepat. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya perjanjian damai San Fransisco pada 8 September tahun 1951. Dengan adanya perjanjian damai San Fransisco tersebut, menandakan bahwa Negara Jepang secara resmi mendapatkan kedaulatan sebagai negara. (United Nations Treaty Series, 1952) Isi dari perjanjian San Fransisco tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 1  
Isi Perjanjian *San Fransisco*

No	Isi Perjanjian <i>San Fransisco</i>
1.	Kepulauan di Negara Jepang diperintah oleh tentara pendudukan Amerika Serikat;
2.	Daerah hasil ekspansi Negara Jepang dikembalikan, Kepulauan Kurilen dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Rusia, Mansyuria, dan Taiwan kepada Cina, Kepulauan di Negara Jepang di Pasifik kepada Amerika Serikat. Korea dibagi menjadi dua, yaitu di bagian utara diduduki Rusia dan di sebelah selatan oleh Amerika Serikat;
3.	Penjahat yang terlibat perang harus dihukum;
4.	Negara Jepang harus membayar kerugian atas perang.

Sumber: The History Channel. (1951). Foreign Office Files for Japan and the Far East 1951. The History Channel.

Adanya perjanjian tersebut membuat Negara Jepang menjadi sadar dan berusaha bangkit, terutama dalam hal perekonomiannya. Dalam masalah ekonomi, ada tiga aspek penting yang diperbaharui oleh Negara Jepang. Ketiga aspek yaitu adalah pembubaran *Zaibatsu*, reformasi pertanian, dan reformasi tenaga kerja. Penjelasan ketiga aspek perubahan untuk sektor ekonomi di atas adalah sebagai berikut: Pembubaran *Zaibatsu* ini terkait dengan keterlibatannya dalam pendanaan Perang Dunia yang berlangsung sampai tahun 1945 dan melibatkan seluruh masyarakat Jepang didalamnya. Para *Zaibatsu* seperti Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, dan Yasuda, yang telah mengendalikan industri melalui kepemilikan mereka secara massal dalam saham di industri batu bara, besi, dan pembuatan kapal

termasuk bank-bank besar, telah bekerja sama dalam kebijakan militeristik pemerintah sepanjang masa perang. Dari tahun 1945, Markas Besar sekutu memecah sebagian besar saham-saham itu dalam rangka mendemokratiskan ekonomi dan mempromosikan paham kapitalisme melalui persaingan bebas. Inilah yang kemudian dinamakan “Pembubaran Zaibatsu”, yang kemudian disusul dengan penetapan pemerintah terhadap undang-undang anti monopoli yang melarang perusahaan-perusahaan besar mengambil keuntungan secara monopoli. Undang-undang ini ditetapkan pada tahun 1947 yaitu tahun yang sama diberlakukannya konstitusi 1947. (I Ketut, 2001: 143) Tujuan dari kebijakan reformasi pertanian adalah untuk memindahkan kepemilikan lahan dari golongan bangsawan yang feodal kepada petani. Lahan pertanian yang dimiliki tuan tanah diambil alih dan dijual kepada petani. Harga jualnya rendah akibat inflasi tinggi yang dengan cepat menurunkan nilai lahan. Ini meningkatkan kepemilikan lahan oleh petani secara signifikan. Reformasi penggunaan lahan dibutuhkan untuk membuat negara menjadi lebih demokratis, karena sebelum perang, sekitar 2/3 dari keseluruhan petani menyewa semua atau sebagian dari lahan yang mereka tanam, dan sistem penggunaan lahan memiliki karakteristik negara feodal. Salah satu karakteristik negara feodal dalam sistem penggunaan lahan adalah tuan tanah yang memiliki lahan biasanya tidak mengelola lahannya sendiri, di mana mereka biasanya menyewakan lahan kepada petani penyewa dan memperoleh keuntungan dari penyewaan lahan. (Yamamura Kozo, 1967) Undang-Undang Serikat Pekerja (Rodo Kuimiaiho/Trade Union Law) sebagai landasan utama untuk mengatasi permasalahan terkait ketenagakerjaan di Jepang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ditentukan pembatasan jam kerja menjadi 8 jam dalam satu hari dan 48 jam dalam satu minggu. Pada tahun 1950 jumlah jam kerja buruh mencapai rata-rata 3000 jam per tahun, sedangkan di negara-negara Barat hanya 1900-2100 jam kerja per tahun. Pada tahun 1952 pemerintah menurunkan jam kerja menjadi 2146 jam per tahun. (Suryohadiprojo, 1987) Pencapaian terbesar lain dari reformasi ini adalah terbentuknya serikat buruh. Perbandingan organisasi pekerja yang bergabung dalam serikat buruh meningkat tajam, dari 0% pada tahun 1945 menjadi 60% pada tahun 1948-1949. Ini adalah pertumbuhan yang luar biasa jika melihat

rata rata pertumbuhan di dunia hanya 30%. Perkembangan cepat serikat buruh disebabkan oleh pembubaran *Zaibatsu* dan kesejahteraan kerja yang rendah yang berakibat pada dibuatnya undang-undang serikat pekerja. Pembuatan undang-undang serikat pekerja pada tahun 1945 menetapkan hak dasar bagi pekerja untuk berorganisasi, tawar-menawar upah, dan untuk menentang. Undang undang ini juga menerapkan sistem kerja seumur hidup dengan batasan melarang pengunduran diri bagi pekerja sebagai timbal balik dengan memberi loyalitas terhadap perusahaan. (Masahiro Takada, 199: 9) Ketiga aspek tersebut tentunya tidak lepas dari pengawasan Supreme Commander of the Allied Powers (SCAP). SCAP sendiri dibentuk sebagai bentuk kekuasaan tertinggi di Negara Jepang yang mana hal tersebut disetujui oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Harry Truman untuk mengatur dan mengawasi jalannya Pemerintahan di Negara Jepang pada masa itu.

Pemerintah Jepang pada saat itu hanya sebagai pelaksana dari kebijakan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat melalui SCAP tersebut. Adapun berikut kedaulatan-kedaulatan yang dimiliki pemerintahan pendudukan atau SCAP:

1. Kekuasaan kaisar dan Pemerintah Negara Jepang untuk memerintah negaranya berada di bawah kekuasaan SCAP;
2. Pengendalian dan Pengaturan Negara Jepang akan dilakukan melalui Pemerintah Negara Jepang sampai menghasilkan hasil yang memuaskan;
3. Maksud dan tujuan dari adanya Deklarasi Postdam akan dilaksanakan secara penuh. Pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, merupakan bagian dari kebijakan untuk menjaga hubungan Negara Jepang dengan negara lain dan menjaga perdamaian serta keamanan di Timur Jauh. (Dani, 2009: 11)

## **2.2 Ekonomi Jepang Tahun 1937 – 1950**

Periode ini meliputi apa yang dinamakan sebagai tahun-tahun ‘abnormal’ dalam sejarah ekonomi Jepang modern. Fase pertama merupakan fase tahun-tahun peperangan, yaitu dimulai dengan pecahnya perang dengan Cina pada bulan Juni 1937 dan terus berlanjut selama waktu delapan tahun sampai dengan berakhirnya Perang Pasifik. Fase kedua adalah fase tahun-tahun Pendidikan dimulai dengan penyerahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 sampai dengan pemulihan

kedaulatan pada bulan April 1952. Tahun terakhir dalam periode ini, yaitu tahun 1950 merupakan tahun terakhir dari pendudukan sepenuhnya.

### **2.3.1 Kebijakan Awal Pemerintah**

Pada tahun 1937 terjadi titik balik yang penting dalam perkembangan ekonomi. Pertama-tama, dilepaskannya ortodoksi keuangan yang dibangun oleh Matsukata pada pertengahan tahun 1880an dan yang seterusnya dipergunakan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas harga. Sejak tahun 1931 sampai tahun 1936 pengeluaran pemerintah terus saja meningkat, peningkatan itu masih moderat sifatnya, sebab orang seperti Takahashi Korekiyo (ahli keuangan konservatif) berkeberatan terhadap meningkatnya dengan keras anggaran militer yang dibiayai dengan pengeluaran obligasi. Tetapi pada akhir tahun 1936, orang-orang konservatif yang berpengaruh mengalami nasib, dibunuh atau dipaksa harus mengubah sikap mereka. Kaum militer mengamuk dan pengeluaran pemerintah mulailah meningkat dengan sangat pesat. Dari tahun 1936 sampai 1937, jumlah pengeluaran pemerintah naik lebih dari dua kali lipat, dan selama waktu tiga tahun berikut jumlah itu pun melonjak dua kali lipat lagi.

Peristiwa penting kedua yang terjadi dalam tahun 1937 adalah dikeluarkannya undang-undang yang memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk menjalankan pengawasan langsung terhadap kehidupan perekonomian. Segera setelah pecah perang dikeluarkan tiga buah keputusan penting. Undang-undang Mobilisasi Persenjataan (juga pernah diberlakukan selama Perang Dunia I), dinyatakan berlaku kembali untuk masa perang yang sekarang. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah berkuasa mengambil tindakan-tindakan mobilisasi demi peningkatan produksi senjata. Kemudian Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Sementara Pengawasan Ekspor-Import. Undang-undang ini memberikan kepada pemerintah kekuasaan mutlak terhadap ekspor-import. Yang berikut adalah Undang-undang Penyesuaian Sementara. Undang-undang ini menentukan bahwa modal dan kredit hanya boleh disalurkan untuk industri yang berkaitan dengan perang. Untuk industri-industri yang sifatnya non-esensial harus dihentikan.

Merasa masih tidak puas dengan hanya peraturan-peraturan pada bulan April tahun 1938 kaum militer mengadakan tukar terhadap pemerintah agar

mengeluarkan Undang-undang Mobilisasi Nasional. Undang-undang ini memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap harga dan upah, serta untuk menetapkan pengawasan atas distribusi. Demikianlah hanya dalam jangka waktu beberapa bulan saja setelah perang pecah, peraturan perundang-undangan yang perlu untuk menggerakkan mobilisasi ekonomi telah tersedia.

### **2.3.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Memperkuat Industri**

Mungkin ada yang mempersoalkan bahwa memilih tahun 1937 sebagai titik balik adalah terlampau kurang mendasar, dengan alasan bahwa pengawasan pemerintah itu sesungguhnya sudah ada sejak awal tahun 1930 an. Undang-undang Pengawasan Industri Besar misalnya, yang dikeluarkan tahun 1931 adalah mendorong pembentukan kartel dalam lapangan usaha yang penting, yang bertujuan agar memperlancar pengawasan pemerintah. Tahun 1933 dikeluarkan Undang-undang Pengawasan Devisa, yang maksudnya membatasi impor barang-barang non-esensial. Diakui bahwa undang-undang tersebut di atas memang meningkatkan ruang lingkup campur tangan pemerintah, tetapi mereka sama sekali tidak bermaksud untuk menghapuskan sistem harga, di mana ekonomi masyarakat kemudian akan diurus berdasarkan cara komando. Sebagai contoh, dalam industri besi baja yang merupakan prioritas utama, agar sesuai dengan semangat Undang-undang Pengawasan Industri Besar, telah dibentuk sebuah perusahaan baru bernama Japan Steel Manufacturing dengan cara melebur Yahata Steel dengan sejumlah perusahaan swasta lainnya. Perusahaan baru ini menguasai 90% produksi besi gubal, tapi produksi baja hanya 50 persen. Perusahaan-perusahaan yang memilih tidak turut peleburan, memiliki tingkat kebebasan yang cukup luas dalam hal produksi baja. Setelah pecahnya perang dalam tahun 1937, pengawasan pemerintah atas produksi dan konsumsi diperluas pula terhadap semua perusahaan. Tapi sungguhpun demikian barulah akhir tahun 1941, yaitu ketika Asosiasi Kontrol Besi dan Baja terbentuk, pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap industri (Asosiasi ini juga dibentuk sejalan dengan Ordonansi Asosiasi Industri Besar yang dikeluarkan sesuai dengan, wewenang pemerintah untuk melakukan mobilisasi).

Mengingat kekacauan ekonomi yang terjadi akibat Perang Pasifik, agaknya bisa timbul dugaan bahwa selama berlangsungnya perang itu, pastilah terjadi kemerosotan dalam pendapatan. GNP riil memang turun, tapi ini baru terjadi pada akhir tahun terakhir peperangan. Menurut kenyataan selama periode 1940-1944 malah terjadi kenaikan sebesar 25 persen. Tapi kenyataan demikian tidak lantas berarti, bahwa selama periode tadi kesejahteraan ekonomi masyarakat telah meningkat. Soalnya komponen utama yang naik hanya anggaran belanja militer (naik sekitar 430%). Adapun konsumsi merosot sebesar 30 persen. Selain itu kenaikan GNP riil tadi karena dipergunakannya barang-barang nonmiliter, dan juga karena mobilisasi terhadap mereka yang di dalam keadaan normal tidak bekerja. Sehingga jika dilihat dari semua angka indeks yang bisa diterima, selama periode tersebut sesungguhnya telah terjadi kemerosotan secara substansial dalam tingkat kemakmuran. (Mimura, 2011)

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur industri selama perang. Produksi industri ringan, yang terutama terdiri dari barang-barang non-esensial itu merosot, baik secara mutlak maupun secara relatif. Terjadinya kemerosotan tersebut sebagian besar akibat adanya dua buah undang-undang yang membatasi produksi barang-barang non-esensial. Kedua undang-undang itu dikeluarkan setelah pecah perang dalam tahun 1937. Produksi tekstil katun misalnya, yang sampai akhir periode terdahulu memperlihatkan pertumbuhan yang baik, amat menurun sesudah September 1937. Ini terjadi ketika Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Sementara Pengawasan Ekspor-Impor mengizinkan impor bahan katun hanya untuk pakaian yang diekspor. Produksi terus menurun, setelah impor katun menjadi sulit dengan pecahnya Perang Pasifik. Dalam tahun 1944 tingkat produksi tekstil hanya sekitar 90% dari angka tertinggi yang dicapai pada pertengahan tahun 1937. Sebaliknya sampai pertengahan tahun 1944, sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah yang menempatkan seluruh baja, metal non-ferrous serta segala mesin ke dalam usaha perang, produksi industri berat jadi meningkat. Adanya prioritas ini, maka saham industri berat terhadap seluruh produksi industri terus naik, dari 50% pada tahun 1936 menjadi lebih 70% dalam tahun 1942.

Karena ketatnya pengawasan pemerintah terhadap ekonomi, terjadilah suatu perkembangan lain yang penting. Untuk menciptakan pengawasan ekonomi yang lebih efektif dan untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber-sumber yang langka, pemerintah lebih menyukai berurusan dengan sejumlah kecil perusahaan besar. Serta bersenjatakan peraturan-peraturan tentang mobilisasi, mengadakan tekanan-tekanan agar dilakukan merger. Lebih lanjut kenyataan meningkatkan lagi kekuasaan ekonomi para Zaibatsu. Mereka berada dalam kedudukan yang menguntungkan untuk menarik manfaat dari kebijaksanaan pemerintah itu. Bukan hanya oleh karena besarnya perusahaan mereka dan bisa mengambil inisiatif dalam persoalan penggabungan (merger), tetapi juga karena mereka dapat menggunakan kekuasaan politik untuk mempengaruhi panitia-panitia negara atau pun asosiasi-asosiasi industri yang bertugas langsung menangani urusan merger. Menjelang akhir perang jika dilihat dari jumlah modal, maka saham empat Zaibatsu terbesar telah meningkat menjadi 50% dalam bidang keuangan, 32% dalam industri berat dan 11% dalam industri ringan. Sedangkan saham dari 10 Zaibatsu terbesar adalah 53% dalam keuangan, 49% dalam industri berat, dan 17% dalam industri ringan. Sungguhpun sejak tahun 1943 sampai tahun 1944 total output meningkat, pengadaan bahan mentah untuk produksi baja dan produksi metal non-ferrous kian bertambah sulit. Akibatnya dari tahun 1943 sampai tahun 1944 produksi sedikit menurun walau telah dilakukan usaha untuk mengatasinya. Adapun peningkatan menyeluruh dari tahun 1943 sampai pertengahan tahun 1944 itu mungkin terjadi dengan penggunaan cadangan yang tersedia, serta peningkatan produksi mesin dan barang-barang jadi lainnya.

Pada pertengahan tahun 1944 Jepang kehilangan supremasi angkatan lautnya dan terputus dari wilayah kekuasaannya di seberang lautan, yang merupakan sumber utama bahan mentah. Akibatnya produksi bahan-bahan dasar mulai menurun dengan cepat, dan selanjutnya akan mempengaruhi produksi barang-barang jadi. Pada awal tahun 1945 terjadi kekurangan yang akut dari minyak, bauksit, biji besi dan bahan mentah esensial lainnya. Kemudian serangan bom yang intensif selama bulan-bulan terakhir peperangan, memberikan pukulan final terhadap ekonomi yang sudah goyah itu.

### 2.3.3 Kondisi Jepang Pasca Perang Dunia II

Pada saat Jepang menyerah keadaan ekonomi sudah sangat turun drastis. Pada bulan Agustus 1945 produksi industri merosot jauh. Jumlahnya hanya merupakan persentase yang kecil jika dibandingkan dengan tingkat produksi tahun sebelum itu, dan hanya sekitar 10% apabila dibandingkan dengan tingkat produksi 1934-1936. Produksi pangan yang tadinya bisa dipertahankan pada tingkat yang relatif agak tinggi, sekalipun dalam keadaan kekurangan tenaga manusia dan pupuk, dalam tahun 1945 turun sekitar 30 persen. Akibatnya pada akhir tahun itu timbul krisis pangan yang berlangsung sampai awal pertama tahun 1946. Kekurangan akan barang-barang jadi lebih diperhebat lagi oleh lemahnya aparat pemerintah dalam mengumpulkan dan mendistribusi barang berdasarkan harga yang sudah ditentukan. Kekalahan perang ini menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah, dan menciptakan keadaan yang nyaris merupakan anarki.

Usaha pemulihan ekonomi dilaksanakan di bawah syarat-syarat yang sukar. Pemboman Sekutu telah menghancurkan sekitar 25% kekayaan nasional Jepang. Pemboman itu antara lain menyebabkan terjadinya kekurangan perumahan yang amat luas di kota-kota besar. Lepasnya daerah-daerah jajahan bukan hanya sekedar berarti bahwa sumber-sumber alam tidak lagi dapat diperoleh secara konsesional, tetapi juga berarti kembalinya jutaan orang Jepang untuk mencari pekerjaan dan perumahan di pasar dalam negeri yang sudah padat itu. Harta milik Jepang di luar negeri yang sebelum perang menghasilkan pendapatan dan merupakan basis untuk kegiatan-kegiatan disita. Selain itu, permintaan pasukan pendudukan akan pelayanan seperti umpamanya perumahan dan pengangkutan, harus juga dipenuhi. Selanjutnya perubahan-perubahan politik di negara-negara Asia yang sebelum perang merupakan pasar penting untuk ekspor Jepang, menyuramkan harapan untuk dapat mempergunakan strategi industri dari masa sebelum perang dalam usaha pemulihan ekonomi.

Keadaan ekonomi pasca perang yang kacau-balau itu, terlihat dalam hiperinflasi yang terjadi dari pertengahan tahun 1945 sampai awal tahun 1949. Dalam beberapa bulan saja sebelum penyerahan, tingkat harga sudah naik dengan cepat serta cukup mengkhawatirkan, walaupun belum seberapa apabila dibandingkan dengan

keadaan yang terjadi sesudah itu. Angka indeks harga konsumen (tahun 1945 selaku basis) naik menjadi 515 dalam tahun 1946, menjadi 1.655 dalam tahun 1947, menjadi 4.857 dalam tahun 1948 dan 7.889 dalam tahun 1949, atau kenaikan total sekitar 8000 persen. Untungnya walaupun keadaan ekonomi begitu ka produksi meningkat. Dalam tahun 1948, produksi industri berat mencapai 50% dari angka tahun 1934-1936, sedangkan produk pangan dapat sepenuhnya dipulihkan.

#### **2.3.4 Kebijakan Stabilisasi Jepang**

Tahun 1949 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan stabilisasi baru dengan prioritas utama menyetop inflasi melalui pengurangan pengeluaran dalam anggaran belanja dan kenaikan pajak. Kebijakan ini diperkuat lagi dalam bulan April 1949 dengan menetapkan adanya kurs tunggal, 360 yen = 1 dolar Amerika Serikat. Adalah perlu bagi pemerintah untuk memonitor gerakan harga serta melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijaksanaan moneter untuk mempertahankan kurs yang telah ditetapkan tadi. Setelah kebijaksanaan ini ternyata efektif dalam menjamin stabilitas ekonomi, pemerintah mulai menghapus berbagai kebijaksanaan yang bersifat pengawasan langsung. Pertengahan tahun 1950 ekonomi pasar pada hakikatnya telah berhasil dipulihkan.

Kebijaksanaan stabilisasi tersebut membawa akibat buruk bagi perusahaan yang manajemennya tidak baik, atau perusahaan-perusahaan yang terlampau melebar. Tetapi secara keseluruhan pengaruhnya terhadap perekonomian adalah baik. Dalam tahun 1949 dan bagian pertama tahun 1950, pemulihan ekonomi berjalan dengan lancar. Dalam bulan Juni 1950 ketika pecah 'Konflik Korea', Jepang dipergunakan menjadi pangkalan suplai dan merupakan tempat 'istirahat dan bersantai' bagi tentara Amerika. Permintaan akan barang dan jasa Jepang naik membumbung; ekonomi mengalami 'boom' yang pertama dalam periode sesudah perang. 'Boom' ini memulihkan ekonomi secara penuh dan banyak perusahaan yang berhasil memetik laba besar. Sejumlah besar persentase dari laba ini tetap ditahan di dalam perusahaan untuk kemudian dipergunakan melalui ekspansi dan pembaruan pabrik, juga untuk mendatangkan teknologi dari luar negeri.

Pemulihan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan kependudukan. Mula-mula pihak Sekutu menjalankan kebijaksanaan 'non responsibility',

sebagaimana terlihat dalam sebuah perintah pada bulan November 1945 yang ditujukan kepada Panglima Tertinggi Sekutu, yang berbunyi: 'Anda harus menjelaskan kepada rakyat Jepang, bahwa Anda tidak berkewajiban untuk mempertahankan suatu tingkat hidup tertentu di Jepang'. Pada tahun 1946 mulai diadakan bantuan pangan untuk menanggulangi kelaparan yang mengancam. Pada waktu itu Panglima Tertinggi Sekutu sekurang-kurangnya telah mengambil tanggung-jawab mencegah penyakit dan keresahan. Dan pada akhir tahun memutuskan untuk membiarkan perekonomian kembali pada tingkat sebelum perang. Sejalan dengan kebijaksanaan ini, diberikan bantuan berupa minyak, bijih besi, batu bara dan bahan mentah lainnya yang diperlukan oleh industri Jepang. Kemudian pada akhir tahun 1948, Panglima Tertinggi Sekutu sangat mendorong Pemerintah Jepang untuk membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan guna menstabilkan ekonomi dan mengembangkan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelum perang. Demikianlah dalam jangka waktu tiga setengah tahun saja, telah terjadi perubahan besar dalam kebijaksanaan kependudukan: perubahan dari sikap non responsibility kepada sikap mendorong pembangunan ekonomi.

Alasan pokok perubahan tersebut adalah karena Amerika Serikat yang pada hakikatnya menentukan kebijaksanaan pendudukan itu, kemudian memiliki pandangan yang positif akan peranan Jepang dalam pemeliharaan keamanan Asia setelah perang. Dengan semakin intensifnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, politik Amerika terhadap Jepang makin baik. Tahun 1948 perang saudara di Cina cenderung dimenangkan pihak komunis. Hal ini nampaknya telah mendorong Amerika Serikat untuk sepenuhnya mendukung Jepang sebagai negara yang memiliki kemungkinan terbaik ikut memelihara keamanan Asia dengan menjadi kekuatan pengimbang terhadap komunisme.

Sejalan dengan politik baru ini, Amerika Serikat tidak hanya mengusahakan kebijaksanaan ekonomi yang lebih baik, tetapi juga mulai melakukan langkah untuk mengakhiri pendudukan. Mula-mula Amerika Serikat menghadapi keberatan-keberatan dari para sekutunya, namun akhirnya dapat berhasil mengajak mereka untuk hadir pada meja perundingan. Berkat pengaruhnya telah diselenggarakan Konferensi Perdamaian San Francisco pada bulan September 1951, dan pada bulan

April tahun berikutnya dengan resmi pendudukan pun berakhir. Kenyataan bahwa Amerika Serikat yang membentuk kebijaksanaan kependudukan dan memulihkan kedaulatan Jepang, telah menentukan kerangka ekonomi Jepang dalam periode pasca perang baik dalam negeri maupun secara internasional. (Yoshiro Kunio, 1983: 16-24)

Dari semua penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan Jepang pada awalnya memberikan kebijakan dalam ekonomi serta industri senjata untuk para militer Jepang demi kebutuhan Perang Dunia II. Dengan adanya peningkatan kegiatan ekspor-impor terutama dari bahan besi dan baja, membuat peningkatan industri Jepang sangat bertambah seiring waktu. Namun kegiatan yang meningkat dimanfaatkan perusahaan swasta serta para Zaibatsu untuk menguasai industri tersebut. Terjadilah terputus wilayah kekuasaan di seberang lautan yang membuat Jepang tidak bisa melakukan kegiatan ekspor-impor akibat kekurangan bahan-bahan produksi yang membuat penurunan ekonomi Jepang. Kekalahan Jepang dan terjadi pemboman di kedua kota penting membuat semakin merosot ekonomi negara tersebut. Tahun 1945-1949 terdapat krisis pangan karena sulitnya membangkitkan ekonomi dengan banyaknya kekurangan yang dimiliki. Pemerintah Jepang pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan stabilisasi baru dengan prioritas utama menyetop inflasi melalui pengurangan pengeluaran dalam anggaran belanja dan kenaikan pajak. Dengan dapatnya dukungan dari Amerika Serikat agar Jepang bisa kembali membangun perekonomian dan bantuan militer Amerika Serikat menjaga negara Jepang membuat Jepang kembali bangkit dan pulih dari krisis ekonomi.